

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN RUKUN WARGA (P2RW) DI KOTA SUKABUMI

Nurul Nisrina Armida, Yeti Rohayati², Euis Eka Pramiarsih³

Email: nurulnisrinakurnia1654@gmail.com¹, yeti Rohayati@gmail.com², euisseka@unla.ac.id³

¹Magister Ilmu Pemerintahan

²⁻³Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Program Pemberdayaan Rukun Warga di Kota Sukabumi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengurus Rukun Warga, pendamping program, pejabat struktural di pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga bervariasi antar wilayah, dengan faktor utama yang mempengaruhi partisipasi meliputi pemahaman masyarakat terhadap program, kapasitas sumber daya manusia di tingkat Rukun Warga, komunikasi dan sosialisasi program, serta motivasi dan kesadaran kolektif masyarakat. Partisipasi yang tinggi berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, peningkatan kemandirian masyarakat, dan pemeliharaan budaya gotong royong. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa keberhasilan Program Pemberdayaan Rukun Warga sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan kelembagaan, sehingga strategi pemberdayaan harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial, kelembagaan, dan kapasitas lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis partisipasi masyarakat sebagai indikator keberhasilan program pemberdayaan berbasis komunitas dengan konteks empiris Kota Sukabumi.

Kata kunci: *Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan; Rukun Warga; Program Pembangunan; Kota Sukabumi*

ABSTRACT

This study aims to analyse community participation in improving the Community Empowerment Programme in Sukabumi City and to identify the factors that influence such participation. The study uses a qualitative descriptive method with a field study approach, in which data is obtained through in-depth interviews, observation and documentation. The research informants consisted of Community Association administrators, programme facilitators, structural officials in the local government, and beneficiary communities. The results of the study show that the level of community participation in the Community Empowerment Programme varies between regions, with the main factors influencing participation including community understanding of the programme, human resource capacity at the Community Association level, programme communication and socialisation, and community motivation and collective awareness. High participation contributes to more effective development implementation, increased community independence, and the preservation of a culture of mutual cooperation. The conclusion of the study states that the success of the Community Empowerment Programme is highly dependent on active community involvement and institutional support, so that empowerment strategies must take into account social, institutional and local capacity factors. The novelty of this study lies in its focus on analysing community participation as an indicator of the success of community-based empowerment programmes in the empirical context of Sukabumi City.

Keywords: *Community Participation; Empowerment; Neighbourhood Associations; Development Programmes; Sukabumi City*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan proses yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan pembangunan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sejalan dengan paradigma pembangunan partisipatif, pemerintah daerah dituntut untuk tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemeliharaan hasil pembangunan. Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan di lingkungannya.

Salah satu bentuk konkret kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal adalah Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Program ini dirancang sebagai stimulus pembangunan berbasis komunitas dengan menjadikan Rukun Warga (RW) sebagai aktor utama pelaksana kegiatan pembangunan. P2RW memberikan dukungan dana hibah kepada RW untuk membiayai kegiatan pembangunan lingkungan, baik fisik maupun sosial, yang direncanakan dan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Program ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kebijakan turunannya yang membuka ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk menerima hibah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Secara normatif, P2RW diharapkan mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat budaya gotong royong, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap pembangunan lingkungan. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, berbagai persoalan

masih ditemukan di lapangan. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program P2RW belum merata antar wilayah, kemampuan pengelolaan administrasi dan keuangan di tingkat RW masih terbatas, serta sosialisasi program belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas program dan tujuan pemberdayaan yang ingin dicapai.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan program pemberdayaan berbasis komunitas. Penelitian Talgia (2017), misalnya, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga mampu menciptakan iklim yang mendorong berkembangnya potensi masyarakat apabila dilaksanakan secara partisipatif. Penelitian lain juga menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan berkontribusi pada peningkatan keberlanjutan dan keberhasilan program. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek proses pemberdayaan atau implementasi kebijakan secara umum, dan belum secara spesifik mengkaji tingkat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program P2RW, khususnya di Kota Sukabumi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program P2RW di Kota Sukabumi. Penelitian ini tidak hanya menelaah tingkat partisipasi masyarakat, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat RW.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan dan penguatan kebijakan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang secara spesifik mengkaji partisipasi masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan Program P2RW, dengan pendekatan kualitatif yang menempatkan masyarakat dan pengurus RW sebagai subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian pemberdayaan masyarakat dengan menghadirkan konteks empiris Kota Sukabumi, yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan tersendiri. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat serta pengembangan program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field study*), yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi. Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi dari para informan mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik yang terkait dengan pelaksanaan program P2RW.
2. Observasi lapangan, dilakukan untuk mencatat secara langsung aktivitas dan interaksi masyarakat serta pengurus RW dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan P2RW.
3. Dokumentasi, berupa pengumpulan dokumen resmi, laporan kegiatan, catatan administrasi, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan program.

Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan peranannya dalam program P2RW. Informan terdiri dari:

1. Pengurus Rukun Warga (RW) yang menjadi pelaksana utama kegiatan;
2. Pendamping program P2RW di tingkat kelurahan, yang bertugas membimbing dan memfasilitasi masyarakat;

3. Pejabat struktural di pemerintah daerah, termasuk pejabat Bappeda, camat, dan lurah, yang berperan dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program;
4. Masyarakat penerima manfaat, yang terlibat atau merasakan dampak langsung dari pelaksanaan program P2RW.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatan dan peluang dalam pelaksanaan program, sehingga temuan penelitian dapat menggambarkan realitas lapangan secara utuh dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kota Sukabumi

a. Kondisi Geografis

Kota Sukabumi merupakan salah satu dari 27 daerah otonom tingkat kabupaten/kota dan sekaligus salah satu dari 9 (sembilan) daerah otonom yang berbentuk kota di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, Kota Sukabumi terletak di Priangan Barat bagian selatan Jawa Barat pada koordinat 106°45'50" Bujur Timur dan 106°45'10" Bujur Timur, 6°50'44" Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya 584 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 Km dari Ibukota Negara (Jakarta) atau 96 Km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung). Batas-batas wilayah Kota Sukabumi meliputi:

1. Sebelah Utara Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi
2. Sebelah Selatan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi
3. Sebelah Barat Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
4. Sebelah Timur Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi

Secara administratif, Kota Sukabumi dibagi ke dalam 7 (tujuh) kecamatan yaitu Baros, Citamiang, Warudoyong, Gunung Puyuh, Cikole, Lembursitu dan Cibeureum, dengan jarak terjauh ke balai kota yaitu Kecamatan Lembursitu sejauh 7 Km. Adapun luas wilayah Kota Sukabumi menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 1. Luas Wilayah (Ha) Wilayah Kota Sukabumi Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Baros	5,58	11%
2.	Cibeureum	9,13	19%
3.	Cikole	6,21	13%
4.	Citamiang	4,0	8%
5.	Gunung Puyuh	5,13	11%
6.	Lembursitu	10,7	22%
7.	Warudoyong	7,56	16%
Jumlah		48,31	100%

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa luas wilayah Kota Sukabumi 48,31 Km², dengan Kecamatan Lembursitu sebagai wilayah yang terluas sebesar 22 % dari total wilayah Kota Sukabumi. Sementara itu Kecamatan Citamiang merupakan wilayah terkecil yang hanya memiliki luas 8 % dari total wilayah Kota Sukabumi.

b. Kondisi Demografis

Keadaan demografi dapat menggambarkan perkembangan kehidupan penduduk di suatu daerah. Penduduk sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah maupun teritorial, merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang harus dikembangkan kualitas hidupnya oleh pemerintah. Suatu daerah yang memiliki kondisi dan kualitas demografi relatif positif, akan menjadi modal yang sangat berharga bagi pemerintah setempat untuk mewujudkan pembangunan dan pelaksanaan program kerja yang berkelanjutan demi memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi melalui hasil estimasi penduduk pada akhir tahun 2023, penduduk Kota Sukabumi tercatat sebanyak 360.644 jiwa yang terdiri dari 181.305 penduduk laki-laki (50.2%) dan penduduk perempuan 179.339 (49.7%). Jika dirinci menurut kecamatan, didapatkan bahwa Kecamatan Cikole merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 63.245 jiwa (18,12%) dari total penduduk Kota Sukabumi. Sementara itu Kecamatan Baros memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 40.383 (11%) dari total penduduk Kota Sukabumi.

Jika ditinjau dari luas wilayah Kota Sukabumi maka kepadatan penduduk di Kota Sukabumi 7.465 jiwa/km². Jika dilihat lebih jauh berdasarkan kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Sukabumi berada di Kecamatan Citamiang dengan kepadatan penduduk 13.654 jiwa/km². Hal ini memungkinkan karena luas wilayah Kecamatan Citamiang paling kecil diantara kecamatan yang lain dan merupakan wilayah yang dekat dengan pusat perbelanjaan. Sedangkan yang terendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Lembursitu dengan kepadatan penduduk 4.098 jiwa/km².

B. Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan didapatkan hasil sebagai berikut.

Berikut adalah hasil analisis data wawancara dengan informan bernama Dadang (45 tahun, warga Nyomplong), terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi. Tingkat Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Program P2RW, Berdasarkan jawaban informan, diketahui bahwa ia telah mengenal program P2RW sejak tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah cukup lama dikenal masyarakat dan eksistensinya dirasakan secara berkelanjutan. Kesadaran terhadap tujuan program pun cukup tinggi. Informan menyatakan bahwa program ini “sangat membantu untuk pembangunan masyarakat,” menandakan pemahaman yang baik terhadap peran P2RW sebagai upaya pemberdayaan berbasis komunitas.

Persepsi dan Pandangan terhadap Pentingnya Program, Informan secara eksplisit menyebutkan bahwa program ini “sangat penting” bagi lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat manfaat langsung dari program tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari sisi pembangunan lingkungan dan peningkatan fasilitas publik.

Bentuk Partisipasi Masyarakat, Partisipasi informan tidak hanya terbatas pada kehadiran, tetapi juga aktif dalam rembug warga dan kerja bakti. Ia juga mengaku terlibat dalam perencanaan program melalui proses musyawarah warga. Keterlibatan seperti ini mencerminkan partisipasi aktif dan kolaboratif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima

manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana dan pengambil keputusan.

Frekuensi dan Konsistensi Keterlibatan, Informan menyatakan bahwa ia terus hadir dan terlibat dalam kegiatan P2RW sampai proses pembangunan selesai. Ini menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi dalam partisipasi, yang dapat menjadi contoh keberhasilan dalam menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan di lingkungan RW.

Evaluasi Terhadap Tingkat Partisipasi Warga Secara Umum, Menurut informan, partisipasi masyarakat di lingkungan RW-nya sudah cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari keterlibatan warga dan partisipasi dalam bentuk swadaya tambahan. Pandangan ini menunjukkan bahwa program P2RW telah mampu membangun solidaritas sosial dan semangat gotong royong.

Faktor Pendorong Partisipasi, Motivasi utama informan untuk berpartisipasi adalah “rasa ingin membangun lingkungan yang lebih baik.” Ini mengindikasikan adanya dorongan intrinsik dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan. Faktor psikologis seperti rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan berkontribusi besar dalam keterlibatan warga.

Kendala dalam Pelaksanaan, Informan mengidentifikasi kendala berupa kurangnya rasa gotong royong dan kepedulian dari sebagian warga. Hal ini mencerminkan adanya tantangan kultural dan sosial yang dapat menghambat partisipasi menyeluruh. Perlu adanya pendekatan khusus bagi warga yang belum tergugah partisipasinya, baik melalui penyuluhan, sosialisasi, maupun penguatan hubungan sosial.

Peran Tokoh Masyarakat, Peran ketua RW sangat sentral, yaitu sebagai koordinator dalam pelaksanaan program. Ini menegaskan bahwa pemimpin lokal memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi warga, membangun komunikasi yang efektif, serta menjaga jalannya program sesuai dengan tujuan.

Dampak dan Manfaat Program, Program P2RW dinilai telah memberikan banyak manfaat, seperti lingkungan yang lebih indah dan tidak terbelah, serta fasilitas umum seperti posyandu dan jalan lingkungan yang diperbaiki. Ini menandakan bahwa program mampu memberikan output nyata yang langsung dirasakan warga.

Inklusivitas dalam Kegiatan, Menurut informan, anak muda dan perempuan turut terlibat dalam kegiatan. Ini menunjukkan bahwa program memiliki dimensi partisipatif yang luas dan inklusif, serta memberikan ruang bagi semua elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

Kekurangan dalam Pelaksanaan, Satu kekurangan utama yang disebutkan adalah keterbatasan anggaran, karena dana stimulan dari pemerintah hanya Rp25 juta. Hal ini menjadi tantangan dalam memaksimalkan pembangunan dan cakupan proyek yang bisa dijalankan. Dengan keterbatasan anggaran, pemilihan prioritas pembangunan menjadi penting.

Transparansi dan Keterlibatan, Informan menyatakan bahwa pelaksanaan program sudah sangat transparan dan melibatkan semua unsur masyarakat. Ini merupakan salah satu indikator penting dari keberhasilan tata kelola program, di mana transparansi mendorong kepercayaan dan legitimasi program di mata warga.

Usulan Pengembangan Program, Beberapa usulan dari informan untuk pengembangan program meliputi:

1. Penambahan anggaran agar pembangunan dapat mencakup aspek yang lebih luas.
2. Peningkatan dukungan dari pemerintah, baik dalam bentuk dana maupun pendampingan teknis.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki aspirasi untuk mengembangkan program menjadi lebih optimal dan berkelanjutan.

Harapan dan Pesan kepada Pemerintah, Informan berharap agar program P2RW tetap berlanjut dan anggarannya ditingkatkan, karena telah memberikan manfaat langsung. Pesan kepada pemerintah adalah agar terus mendukung dan mempertahankan program ini karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program P2RW di lingkungan Nyomplong Kota Sukabumi sangat tinggi. Faktor-faktor pendukung seperti rasa kepemilikan, kepemimpinan RW, nilai gotong royong, dan dampak nyata dari program menjadi kunci keberhasilannya. Namun, terdapat tantangan seperti keterbatasan dana dan kurangnya partisipasi dari sebagian warga. Peningkatan anggaran, penguatan komunikasi

sosial, dan pendampingan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program di masa depan.

Berikut adalah hasil analisis data wawancara berdasarkan keterangan dari informan atas nama Heri Heriawan, umur 44 tahun, warga Jalan Pabuaran, Warudoyong, Kota Sukabumi, terkait Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Mengenai Pemahaman dan Pengalaman terhadap Program P2RW, Informan mengenal program P2RW sejak tahun 2020 dan memiliki pandangan bahwa program ini sangat membantu dalam pembangunan tingkat RW. Ia menilai P2RW sebagai program yang sangat penting karena berperan langsung dalam mempercepat proses pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi dalam Program, Partisipasi informan cukup aktif, terbukti dengan keterlibatannya dalam musyawarah tingkat kelurahan, perencanaan bersama warga, serta turut membangun infrastruktur. Kehadirannya dalam hampir setiap kegiatan P2RW menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi sebagai bagian dari struktur RW.

Persepsi terhadap Partisipasi Warga, Menurut informan, partisipasi masyarakat sudah tinggi karena banyak warga yang secara sukarela berkontribusi tanpa harus diminta. Motivasi utama partisipasi warga, termasuk dirinya sendiri, adalah semangat membangun wilayah sendiri, bukan semata-mata imbalan.

Hambatan yang Dihadapi, Meski partisipasi tinggi, terdapat sebagian warga yang masih berharap mendapat upah langsung (dalam bentuk uang atau sembako), yang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga semangat gotong royong yang murni.

Peran Tokoh Masyarakat dan Ketua RW, Tokoh masyarakat, terutama ketua RW, memiliki peran besar dalam mendukung P2RW dengan cara menyosialisasikan pentingnya program ini dalam berbagai forum warga, sehingga memupuk kesadaran kolektif untuk berpartisipasi.

Manfaat Program P2RW, Manfaat yang dirasakan informan sangat konkret, antara lain:

1. Perputaran ekonomi meningkat karena akses jalan lebih baik.

2. Sarana prasarana membaik, yang mendukung usaha pertanian dan distribusi hasil jualan warga.

3. Peran aktif anak muda dan perempuan, misalnya pemuda membantu angkut material, ibu-ibu menyediakan konsumsi.

Kelemahan Pelaksanaan Program, Kelemahan utama program ini adalah terbatasnya anggaran, sehingga pembangunan hanya bisa dilakukan di titik prioritas, tidak mencakup seluruh wilayah yang membutuhkan. Transparansi dan Keterlibatan, Pelaksanaan program dinilai sudah sangat transparan, dan melibatkan berbagai unsur masyarakat tanpa diskriminasi.

Usulan dan Harapan terhadap Pengembangan Program, Informan mengusulkan agar pengembangan P2RW ke depan dilakukan dengan sistem rolling antar kelurahan, agar pemerataan pembangunan bisa lebih terasa. Harapannya, program ini terus berlanjut dengan lebih banyak inovasi pembangunan, serta penambahan anggaran agar dampaknya lebih maksimal.

Wawancara dengan Heri Heriawan menunjukkan bahwa P2RW memiliki dampak positif yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam aspek pembangunan infrastruktur dan peningkatan partisipasi warga. Keterlibatan informan yang aktif menjadi contoh partisipasi yang ideal. Namun, keberhasilan program ini masih bergantung pada peningkatan dukungan anggaran dan penguatan kesadaran gotong royong di kalangan seluruh warga.

C. Pembahasan

a. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Di Kota Sukabumi

Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) merupakan salah satu bentuk inisiatif pembangunan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat partisipasi warga dalam proses pembangunan di tingkat lingkungan paling bawah, yaitu Rukun Warga (RW). Program ini menjadi sarana strategis untuk mendorong kolaborasi antara masyarakat, tokoh lokal, dan pemerintah kota dalam menangani isu-isu lingkungan, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan sosial ekonomi (Aminah, 2020). Keunggulan dari P2RW terletak pada prinsip gotong royong dan perencanaan partisipatif yang memungkinkan

masyarakat secara langsung merumuskan kebutuhan wilayahnya serta terlibat aktif dalam proses pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan.

P2RW secara nyata memberikan dampak positif, terutama dalam pembangunan fisik lingkungan seperti perbaikan jalan, saluran air, pos ronda, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan informan, yang menyebutkan bahwa program ini telah mempercepat pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga sehari-hari. Menurut (Hanum, 2019) kemudahan akses jalan yang diperoleh melalui P2RW telah memberi dampak lanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi warga, khususnya mereka yang bergiat dalam usaha pertanian dan perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bersifat fisik, namun juga memiliki implikasi sosial-ekonomi yang cukup luas.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci keberhasilan program P2RW. Dalam praktiknya, warga tidak hanya berkontribusi dalam bentuk tenaga, tetapi juga turut hadir dalam musyawarah dan proses perencanaan, seperti Musrenbang tingkat kelurahan. Informan menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam musyawarah dan pembangunan dilakukan karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan wilayah RW-nya (Salsabila & Mayarni, 2021). Semangat ini juga tercermin dalam peran anak muda dan perempuan yang turut berkontribusi sesuai kapasitasnya, misalnya pemuda membantu pengangkutan material pembangunan, sedangkan ibu-ibu menyediakan konsumsi untuk para pekerja. Keterlibatan berbagai lapisan masyarakat ini menunjukkan bahwa P2RW berhasil membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap pembangunan (Lubis & Zubaidah, 2019).

Program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala yang diungkapkan adalah terbatasnya anggaran, yang menyebabkan pembangunan tidak bisa merata di seluruh wilayah RW dan hanya difokuskan pada titik-titik prioritas. Masih ada sebagian kecil warga yang berharap mendapatkan kompensasi material dari keterlibatannya dalam program, yang dapat mengurangi nilai gotong royong itu sendiri. Perlu ada penguatan pemahaman mengenai nilai sosial partisipasi serta peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah agar kebermanfaatannya P2RW semakin meluas (C. N. Sari et al., 2018).

Dalam pandangan ke depan, program P2RW memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, salah satunya melalui sistem rotasi pembangunan antar kelurahan agar pemerataan manfaat dapat tercapai secara adil. Selain itu, transparansi dan inovasi dalam pelaksanaan perlu terus dijaga untuk membangun kepercayaan dan antusiasme masyarakat (Putri, 2020). Harapannya, P2RW dapat menjadi model pembangunan berbasis komunitas yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjawab tantangan lokal secara efektif di Kota Sukabumi maupun daerah lainnya di Indonesia.

Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi telah menjadi katalisator penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, P2RW mendorong warga untuk aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek-proyek pembangunan di tingkat RW (Parasian Manurung et al., 2023).

Salah satu indikator keberhasilan P2RW adalah tingginya tingkat swadaya masyarakat. Di RW 07 Kelurahan Sindangpalay, misalnya, warga berhasil mengumpulkan dana swadaya sebesar Rp41 juta untuk melengkapi anggaran P2RW sebesar Rp25 juta dalam pembangunan jalan rabat beton sepanjang 165 meter. Hal serupa terjadi di RW 03 Kelurahan Sukakarya, di mana warga bergotong royong membangun jalan gang dengan rabat beton dan hotmix sepanjang 300 meter, yang sebelumnya berupa jalan tanah.

Partisipasi aktif masyarakat juga terlihat dalam pembangunan sarana air bersih di RW 08 Kelurahan Benteng. Dengan dukungan dana swadaya sekitar Rp8 juta, warga berhasil membangun sumur bor sedalam 30 meter untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di RW 03 Kelurahan Tipar, masyarakat membangun sarana air bersih (SAB) yang terdiri dari sumur bor dan tangki air, serta membangun musala di atas tanah wakaf dengan dana swadaya mencapai Rp90 juta.

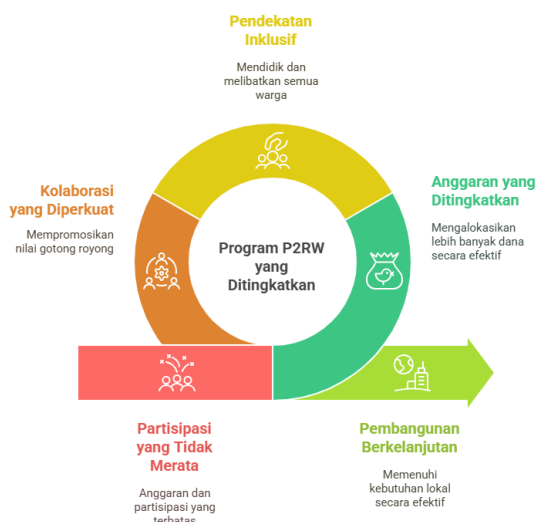
Keberhasilan P2RW juga tercermin dalam peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan. Di Kecamatan Warudoyong, pembangunan jalan lingkungan di RW 1 Kelurahan Sukakarya awalnya direncanakan sepanjang 150 meter, namun berkat dukungan masyarakat, jalan yang dibangun mencapai 500 meter dan dilengkapi dengan lampu jalan. Di Kelurahan Dayeuhluhur, 21 RW telah menyerap anggaran P2RW untuk

pembangunan fisik seperti jalan setapak, talud, dan rehabilitasi masjid, dengan tingkat kemajuan pelaksanaan mencapai sekitar 95 persen.

Program P2RW juga mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam pembangunan fasilitas umum. Di Kelurahan Cikondang, misalnya, warga memanfaatkan dana P2RW untuk membangun talud, merehabilitasi posyandu dan mushola, serta fasilitas lainnya sesuai dengan hasil musyawarah warga. Di Kelurahan Babakan, masyarakat membangun taman, posyandu, dan pengaspalan jalan dengan capaian pengerjaan mencapai 90 persen.

Pemerintah Kota Sukabumi terus mendukung program P2RW dengan meningkatkan anggaran dari Rp20 juta menjadi Rp25 juta per RW pada tahun 2022. Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, menyatakan bahwa peningkatan anggaran ini didasarkan pada evaluasi positif terhadap penyerapan dana dan partisipasi masyarakat yang meningkat dari tahun ke tahun.

P2RW telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan di Kota Sukabumi. Program ini tidak hanya memperkuat semangat gotong royong, tetapi juga memberdayakan warga untuk mengambil peran aktif dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah mereka. Dengan dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat, P2RW diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Sukabumi.



Gambar 1. Pembangunan berbasis Komunitas, Buku Penyusunan P2RW Kota Sukabumi

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2025)

b. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Rukun Warga Di Kota Sukabumi

Partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Namun, tingkat partisipasi tersebut tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor ini meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, serta peran pemerintah (Juniazti, 2017). Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam meningkatkan keterlibatan warga secara aktif dalam P2RW, sehingga program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan dan kesadaran warga terhadap pentingnya pembangunan lingkungan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat program P2RW dan bagaimana keterlibatan mereka dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitar (Wahidin et al., 2020). Kesadaran ini membuat warga lebih termotivasi untuk ikut serta dalam musyawarah, perencanaan kegiatan, bahkan dalam memberikan kontribusi tenaga, waktu, dan dana. Di beberapa kelurahan seperti Sindangpalay dan Tipar, tingkat partisipasi tinggi karena adanya tokoh masyarakat dan warga yang memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pembangunan berbasis komunitas.

Kondisi ekonomi masyarakat juga berperan penting dalam memengaruhi partisipasi mereka. Warga dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil lebih mudah untuk berpartisipasi secara materiil, seperti memberikan iuran atau bantuan bahan bangunan dalam pelaksanaan proyek P2RW (K. K. I. K. Sari, 2022). Namun, tidak berarti warga dengan ekonomi menengah ke bawah tidak berpartisipasi. Justru, dalam banyak kasus, warga dengan ekonomi terbatas menyumbangkan tenaga dan waktu mereka sebagai bentuk partisipasi non-materiil yang sama berharganya. Hal ini menunjukkan bahwa

partisipasi dapat bersifat inklusif jika pengelolaan program dilakukan secara adil dan transparan.

Kepemimpinan di tingkat Rukun Warga (RW) juga menjadi faktor penting. RW yang memiliki pemimpin yang komunikatif, transparan, dan aspiratif cenderung mampu membangun kepercayaan warga serta menciptakan iklim partisipatif yang kondusif. Ketika warga merasa suara mereka didengar dan usulan mereka diwujudkan dalam program kerja, mereka cenderung merasa memiliki program tersebut. Kepemimpinan yang baik juga mampu memediasi perbedaan pendapat dan menjaga semangat gotong royong antarwarga. Dalam pelaksanaan P2RW di Kelurahan Sukakarya dan Cikondang, terlihat bahwa partisipasi tinggi terjadi ketika RW mampu memfasilitasi musyawarah secara terbuka dan menginformasikan perkembangan program kepada warga secara rutin.

Budaya gotong royong dan solidaritas sosial yang masih kuat di sebagian besar wilayah Kota Sukabumi menjadi kekuatan yang mendasari tingginya partisipasi masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal ini mendorong masyarakat untuk secara sukarela bergotong royong dalam pembangunan jalan lingkungan, sarana air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Budaya ini memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif atas pembangunan wilayah tempat tinggal mereka. Ketika masyarakat merasa bahwa hasil pembangunan adalah milik bersama, maka rasa memiliki dan keterlibatan mereka pun meningkat.

Ketersediaan informasi dan transparansi program juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi warga. Warga yang mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tujuan, mekanisme, serta manfaat dari P2RW akan lebih mudah memahami urgensi keterlibatan mereka. Sebaliknya, jika informasi minim atau tidak disampaikan dengan baik oleh aparat kelurahan atau RW, maka warga akan cenderung bersikap apatis dan tidak percaya terhadap program tersebut. Keterbukaan informasi serta media komunikasi yang efektif sangat penting untuk menjaga partisipasi masyarakat tetap tinggi.

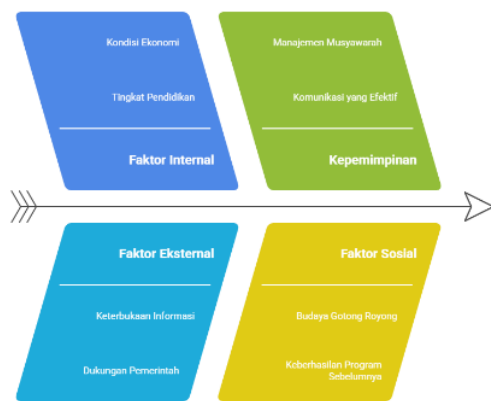
Peran pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Sukabumi, juga sangat signifikan dalam membentuk persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap P2RW. Pemerintah yang aktif melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta memberikan

dukungan anggaran yang cukup seperti peningkatan dana dari Rp20 juta menjadi Rp25 juta per RW pada tahun 2022 menunjukkan komitmen yang nyata terhadap pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya penghargaan atau apresiasi terhadap RW yang berhasil melaksanakan program dengan baik juga menjadi motivasi tambahan bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi.

Faktor komunikasi interpersonal antarwarga dan antarstruktur organisasi lokal seperti RT dan RW turut memperkuat partisipasi. Hubungan sosial yang harmonis dan terbuka antarwarga mendukung terciptanya dialog yang sehat dan musyawarah yang produktif. Ketika warga merasa nyaman untuk menyampaikan ide dan saran mereka dalam forum RW atau pertemuan lingkungan, mereka akan lebih mudah terlibat dalam program-program pembangunan. Komunikasi yang baik juga mempercepat proses koordinasi dalam pengerjaan proyek fisik seperti pembangunan jalan, talud, atau sarana air bersih.

Pengalaman sukses masa lalu dari pelaksanaan P2RW juga menjadi faktor pemicu partisipasi warga. Ketika warga melihat hasil nyata dari program sebelumnya misalnya perbaikan jalan, pembangunan posyandu, atau penyediaan air bersih mereka akan semakin yakin bahwa kontribusi mereka membuahkan hasil. Hal ini menciptakan efek domino positif di mana keberhasilan sebelumnya mendorong keterlibatan lebih besar pada program berikutnya.

Partisipasi masyarakat dalam program P2RW di Kota Sukabumi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks namun saling melengkapi. Faktor pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, budaya gotong royong, komunikasi, peran pemerintah, dan keberhasilan program sebelumnya semuanya berkontribusi dalam menciptakan keterlibatan yang aktif dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas P2RW di masa mendatang, penting bagi semua pihak baik pemerintah, aparat kelurahan, RW, maupun warga untuk memahami dan mengelola faktor-faktor ini secara sinergis dan berkelanjutan.



Gambar 2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2025)

4. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

- Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi tergolong tinggi. Masyarakat tidak hanya terlibat sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam berbagai tahapan program, mulai dari perencanaan melalui musyawarah warga, pelaksanaan kegiatan kerja bakti, hingga pengawasan jalannya program. Tingginya partisipasi ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka.
- Partisipasi aktif ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, baik dari sisi internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi rasa memiliki terhadap lingkungan, motivasi pribadi untuk memperbaiki kondisi sosial, serta pemahaman yang baik terhadap tujuan program. Sementara itu, faktor eksternal yang turut mendorong partisipasi meliputi kepemimpinan RW yang efektif, budaya gotong royong yang masih kuat di masyarakat, serta transparansi pelaksanaan program yang membangun kepercayaan warga.

Meskipun demikian, program P2RW juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan dana stimulan dari pemerintah dan belum meratanya tingkat partisipasi di kalangan masyarakat. Beberapa warga masih kurang peduli atau enggan terlibat dalam kegiatan bersama. Hal

ini menunjukkan bahwa perlu ada strategi pendekatan yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan kelompok perempuan. Program P2RW telah berhasil membangun semangat pemberdayaan dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan berbasis RW. Untuk menjamin keberlanjutan program, diperlukan peningkatan dukungan dari pemerintah dalam bentuk penambahan anggaran, pendampingan teknis, serta penguatan komunikasi sosial. Dengan demikian, program ini dapat terus berkembang menjadi model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

B. Saran

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Program Pemerintah daerah dan pihak kelurahan perlu lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan P2RW kepada seluruh lapisan masyarakat. Edukasi ini penting untuk menjangkau warga yang belum memahami pentingnya partisipasi, sehingga dapat mendorong keterlibatan yang lebih merata, termasuk dari kalangan muda dan perempuan.

adalah rangkuman dari penelitian. Simpulan menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian.

1. Penambahan dan Pengelolaan Dana Secara Optimal

Dukungan anggaran dari pemerintah sebaiknya ditingkatkan agar program dapat mencakup lebih banyak aspek pembangunan. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, serta pelatihan manajemen keuangan bagi pengurus RW agar pemanfaatan dana stimulan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Lokal

Ketua RW dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam menggerakkan partisipasi warga. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen program bagi mereka agar dapat menjalankan perannya dengan lebih optimal. Kepemimpinan yang kuat dan komunikatif akan berpengaruh besar dalam membangun solidaritas dan keberhasilan program P2RW secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, R. S. (2020). Gaya Komunikasi Pemimpin Perempuan Dalam Menyampaikan Pesan Pembangunan. *Media Bahasa, Sastra, Dan Budaya Wahana*, 26(2).
<https://doi.org/10.33751/Wahana.V26i2.2768>
- Affitudin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Agus, Erwan. 2015. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media: Yogyakarta.
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Anwar, Oos M. 2004. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hanum, F. (2019). Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota No.40 Th. 2014 Tentang Pedoman Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(2).
<https://doi.org/10.30737/Mediasosian.V3i2.575>
- Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Juniazti, T. (2017). Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw) Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 4(1 Februari).
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2).
[https://doi.org/10.25299/Jiap.2019.Vol5\(2\).4188](https://doi.org/10.25299/Jiap.2019.Vol5(2).4188)
- Mardikanto, Totok. Dan Poerwoko Soebito. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parasian Manurung, Zaili Rusli, & Dadang Mashur. (2023). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanjung Rhu Kota Pekanbaru. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2).
<https://doi.org/10.25157/Moderat.V9i2.2897>
- Putri, R. (2020). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmbrw). *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2).
<https://doi.org/10.31258/Jkp.11.2.P.63-70>
- Salsabila, N. P., & Mayarni, M. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Menuju Smart City Madani Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. *Reformasi*, 11(2).
<https://doi.org/10.33366/Rfr.V11i2.2596>
- Sari, C. N., Heriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. *Jiana: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(1).
- Sari, K. K. I. K. (2022). Analisis Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Dalam Melakukan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Se-Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo*.
- , 2014, Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi, Jakarta: Gunung agung.
- Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta. Suharto, Edi, 2009, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ulbert Silalahi. 2003. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru Aglesindo.

- Ulbert Silalahi, 2009, Studi Tentang Ilmu Administrasi dan Manajemen.
- Usman Sunyoto, 2004. Pembangunan dan Penguatan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi&Revisi Terbaru). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Wahidin, U., Mulauddin, A., & Fauzi, M. F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Satuan Pendidikan Islam Berbasis Masjid Di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. *Khidmatul Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
<https://doi.org/10.30868/Khidmatul.V1i01.984>

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Berita Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021

JURNAL

- Dadang Mashur, 2016, Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PPPMP) Di Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis, (Perpustakaan Universitas Riau).
- Talgia, 2017, Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru.